

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, M. D. (2005). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Ashworth, A. (1991). Principles of Criminal Law. Clarendon Press.
- Chazawi, A. (2007). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Musa, A. A. (2009). Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional. Jala Permata Aksara.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2021). Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum). Alumni.
- Marpaung, L. (2004). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Prenada Media Group.
- Muhammad, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana. UII Pers.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, N. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Pustaka Prima.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Rajagrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya. Politeia.
- Tahir, H. (2010). Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Laksbang Pressindo.
- Waluyadi. (2009). Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Mandar Maju.

## **B. JURNAL**

- Andrisman, T. (2013). Hukum Peradilan Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Maroni, Sitepu, S., & Ariani, N. D. (2019). Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4).
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345.  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Sartika, A. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung. Universitas Lampung.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).
- Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Dikota Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **C. INTERNET**

- Direktori Putusan. “Membujuk Anak.”  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=membujuk+anak>
- <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.
- <http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.
- <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.20.

<http://lapas-narkotikajkt.com/cuti-mengunjungi-keluarga-cmk/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25.

<http://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/pengadilan-anak.html>, diakses pada tanggal 16 April 2024 jam 22.00.

<https://gurupkn.com/pengertian-remisi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 20.00.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.